

SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

M. Fareza Akbar

NPP.31.0309

Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: mfarezaakbar@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Handling and controlling homeless people and beggars is one way a country can create a better life for its people. The factors that cause poverty to occur are the lack of education, skills, unstable income, and the poor standard of living of the community. Because of this, homeless people and beggars appear as a solution to survive. **Objective:** This research aims to find out the synergy between Satpol PP and social services in dealing with homeless people and beggars as well as the inhibiting factors and efforts to handle this. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods through an inductive approach with data collection techniques through documentation, interviews and observation. **Research results:** from research results based on the Najiyati & Rahmat Synergy theory, the Bandarlampung City Satpol PP and the Bandarlampung City Social Service have played an active role in handling homeless people and beggars. However, in its implementation, there are inhibiting factors related to the lack of infrastructure and human resources, which results in less than optimal results. **Conclusion:** based on the things discussed in this thesis, it is the handling of homeless people and beggars in Bandarlampung City where this research has not gone well enough. Suggestions that can be given by the author are to improve communication and coordination between Satpol PP and the Social Service, require a legal basis, as well as improve infrastructure and the quality of human resources to be more qualified.

Keywords: Synergy, Civil Servant Police, Social Services, Handling, Homeless And Beggar.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan dan penertiban gelandangan dan pengemis merupakan salah satu cara sebuah negara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Adapun faktor yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi ialah minimnya pendidikan, keterampilan, penghasilan tidak tetap, serta taraf hidup masyarakat yang buruk. Sebab itu, muncul gelandangan dan pengemis sebagai solusi untuk bertahan hidup. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergi antara satpol pp dengan dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis serta faktor penghambat dan upaya penanganan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan

observasi. **Hasil penelitian:** dari hasil penelitian berdasarkan teori Sinergitas Najiyati & Rahmat pada Satpol PP Kota Bandar Lampung dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah berperan aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat faktor penghambat terkait minimnya sarana prasarana dan sumber daya manusia sehingga berdampak pada hasil yang tidak maksimal. **Kesimpulan:** berdasarkan hal yang dibahas pada skripsi ini adalah ada pada penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung yang dimana penelitian ini belum berjalan dengancukup baik. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah dengan memperbaiki lagi komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial, diperlukannya dasar hukum, serta peningkatan sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memumpuni.

Kata Kunci : Sinergitas, Satpol PP, Dinas Sosial, Penanganan, Gelandangan Dan Pengemis.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang memiliki beragam karakteristik dan sejarah yang menarik. Bandar Lampung memiliki lokasi yang strategis, Terletak di pesisir selatan Pulau Sumatra, kota ini merupakan pintu gerbang utama antara Sumatra dan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, yang menjadikan kota ini pusat transportasi dan perdagangan yang vital di wilayah ini. Kota Bandar Lampung merupakan pusat pendidikan dan budaya di wilayah Lampung. Namun, seperti kota-kota lainnya, Bandar Lampung juga memiliki sejumlah tantangan. Masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Gelandangan dan pengemis adalah dua kelompok sosial yang seringkali menjadi sorotan dalam perdebatan tentang ketertiban umum di masyarakat. Gelandangan adalah individu yang hidup tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap, seringkali hidup mengembara di tempat umum atau tinggal nomaden, dan melanggar norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Sementara pengemis adalah individu yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di muka umum, dengan berbagai cara dan alasan. Gelandangan dan pengemis dapat menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat dan dapat mempengaruhi kenyamanan Masyarakat serta keamanan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Kehadiran gelandangan serta pengemis yang semakin merajalela benar-benar mengganggu situasi warga, yang dimana hal ini dapat menghambat kegiatan di jalan raya, tidak hanya itu mereka juga merusak keindahan tata kota, mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Gelandangan serta pengemis dapat ditemukan di kawasan lampu lalu lintas, pertigaan, dan perempatan. Contohnya seperti manusia silver yang sering meminta-minta uang, Bahkan ada yang berada di Kawasan pemukiman warga sekitar.

Tabel 1. Data Gelandangan Dan Pengemis

No.	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1.	2020	48
2.	2021	47
3.	2022	47
4.	2023	109

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung selama tiga tahun terakhir. Seperti yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini, statistik menjelaskan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Bandarlampung tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2020 yang jumlahnya 48 jiwa kemudian di tahun 2021 berkurang menjadi 47 jiwa, dan pada tahun berikutnya pun tidak ada perubahan yang berarti dan tetap stabil seperti tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun berikutnya lagi yakni pada tahun 2023 meningkat menjadi 109 (BPS Kota Bandarlampung 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah Penelitian (Gap Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis berhubungan dengan tingginya jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terus meningkat sepanjang tahun terutama pada tahun 2023 sebanyak 109. Jumlah ini di khawatirkan terus meningkat mengingat persebaran daerah tempat mereka beroperasi juga meningkat. Ada sejumlah daerah yang menjadi ikon penting di Kota Bandarlampung seperti daerah bundaran gajah dan lampu merah masjid al furqon. Padahal, daerah tersebut merupakan daerah steril yang harusnya terbebas dari kegiatan Gelandangan dan Pengemis. Hal ini menunjukkan perlu dilakukannya penertiban oleh Satpol PP yang bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, dalam pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis diperlukan adanya Sinergitas antar keduanya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam hal sinergitas maupun penanganan Gelandangan dan Pengemis. Penelitian yang dilakukan oleh (Maria H. Wiratno, 2022) mengenai penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro, Provinsi Lampung, memiliki relevansi yang cukup sesuai dengan penelitian tentang "Sinergitas satuan polisi pamong praja dengan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung" karena kedua penelitian ini memfokuskan perhatian pada isu yang serupa, yaitu penanganan gelandangan dan pengemis, namun berbeda dalam konteks geografisnya. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, masing-masing memiliki karakteristik kota dan populasi yang unik. Oleh karena itu, penanganan

gelandangan dan pengemis di dua kota ini dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan pendekatan dan strategi yang berbeda dalam penertiban, dan mungkin mengungkapkan perbedaan dalam hasil dan efektivitas penanganan masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Heranita Wiratno pada tahun 2022 di Kota Metro memberikan perspektif yang relevan bagi penelitian di Kota Bandar Lampung. Hal ini membantu memahami perbedaan dan kesamaan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di dua kota di Provinsi Lampung serta memperkaya pemahaman tentang tantangan dan peluang yang ada dalam Upaya penertiban ini. Skripsi oleh (Muhammad Munawir, 2022) dan skripsi tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung memiliki persamaan yang relevan. Perbedaan utama antara keduanya adalah lokasi penelitian. Skripsi Muhammad Munawir difokuskan pada Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sementara skripsi tentang Kota Bandar Lampung berfokus pada wilayah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Perbedaan ini menciptakan perbedaan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi pendekatan dan strategi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kedua lokasi. Tidak hanya itu, fokus penelitian juga berbeda. Skripsi Munawir lebih menekankan pada Sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta dalam upaya penertiban gelandangan dan pengemis, sementara skripsi tentang Kota Bandar Lampung lebih menitikberatkan pada sinergitas yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Ini menunjukkan perbedaan dalam sudut pandang penelitian. Meskipun ada perbedaan ini, keduanya memiliki persamaan penting. Kedua penelitian ini berbagi fokus pada isu inti, yaitu penertiban dan penanganan gelandangan dan pengemis. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan lokasi penelitian, keduanya berusaha untuk memahami dan mengatasi masalah terkait gelandangan dan pengemis. Selain itu, keduanya mengidentifikasi beberapa tantangan umum, seperti kendala sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, yang mempengaruhi efektivitas upaya penertiban dan penanganan. Ini menunjukkan bahwa kendala ini adalah masalah umum yang perlu diatasi di berbagai lokasi. Akhirnya, keduanya memiliki relevansi penting dalam konteks kebijakan dan praktik penanganan gelandangan dan pengemis. Dengan memahami tantangan dan strategi yang berbeda dalam konteks yang berbeda, penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan dan praktik di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Roza Erdillah, 2015) tentang "Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru" cukup memiliki Perbedaan yang signifikan dengan penelitian "Sinergitas satuan polisi pamong praja dengan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung" yaitu terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian, dan aspek sinergitas yang ditekankan. Lokasi penelitian menjadi perbedaan utama, dengan penelitian Bandar Lampung berfokus pada Provinsi Lampung, sementara penelitian Pekanbaru berfokus pada Provinsi Riau. Ini menciptakan perbedaan dalam karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi penanganan gelandangan dan pengemis di kedua kota. Fokus penelitian juga berbeda, dengan penelitian Bandar Lampung lebih menekankan pada sinergitas penanganan yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dinas sosial, sedangkan penelitian Pekanbaru lebih berfokus pada evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani gelandangan dan pengemis. Selain itu, aspek sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial menjadi fokus dalam penelitian Bandar Lampung, sementara penelitian Pekanbaru mungkin lebih menyoroti evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kurangnya regulasi yang mengatur gelandangan dan pengemis sebagai faktor penghambat. Konteks hukum dan regulasi yang berbeda juga bisa menjadi perbedaan,

dengan artikel ilmiah Pekanbaru mengidentifikasi kurangnya regulasi yang mengatur gelandangan dan pengemis sebagai salah satu hambatan, sementara hal ini mungkin tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Bandar Lampung. Penelitian (Masrun, 2020) Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Kewirausahaan UKM Bidang Pariwisata Di Kawasan Pesisir Pantai Cemara Lembar Kabupaten Lombok Barat, menemukan bahwa melalui pelatihan dan pembinaan masyarakat telah membawa perubahan yang meningkat pada pengembangan wirausaha dan UKM, walaupun tidak signifikan dari kondisi sebelum dengan sesudahnya. Penelitian (Ida Bagus Eka Artika,dkk, 2020) Upaya Menurunkan Tingkat Kemiskinan Melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan bahwa diperlukan strategi untuk mengatasi kelemahan yang ada pada masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik tentang Gelandangan dan Pengemis di daerah Kota Bandarlampung sering dibahas dan memperlihatkan bahwa sudah ada beberapa penelitian yang mengaitkan bagaimana peran Sinergitas dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan mendasar yang memperlihatkan perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti meskipun sama-sama membahas peran Satpol PP namun juga akan dihubungkan dengan Dinas Sosial. Perbedaannya terletak pada metode yang akan digunakan yaitu dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan triangulasi metode dan sumber dengan tujuan menguatkan dan meningkatkan nilai keakuratan suatu data.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya Sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis beserta dengan faktor pendorong dan penghambat serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman (1992) yakni dengan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Fernandes, S. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. Proses ini berlangsung sepanjang tahap sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data, dan disajikan dalam bentuk yang beriringan untuk membangun pemahaman komprehensif yang disebut "analisis" (Fuad dan Nugroho, 2014). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi (Creswel, 2013). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 4 orang informan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling yang terdiri dari Kepala Desa Mallari dan 3 orang dari Kelompok Usaha Bersama Pengolahan Rumput Laut. Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2019) yang terdiri dari 4 indikator penilaian, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

III. Hasil dan Pembahasan

Peneliti telah mendapatkan data di lapangan mengenai Sinergitas Satpol dan Dinsos dimana terdapat beberapa indikator yang menunjang keberhasilan dan terlaksananya sinergitas secara optimal.

3.1. Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peneliti melakukan analisis terhadap Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sinergitas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a. Numerical
Numerical adalah melihat komunikasi berjalan dari jumlah orang yang terlibat dalam interaksi komunikasi. Jumlah umum kriteria komunikasi biasanya terdiri dari dua orang atau lebih, tergantung pada situasi dan topik yang dibicarakan.
 - b. Feedback
Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang telah diberikan sebagai akibat dari pemberian informasi atau terjadinya interaksi. Dalam hal ini feedback menjadi salah satu indikator dari komunikasi, dimana komunikasi hanya akan terjadi apabila orang atau dinas atau lembaga yang dilibatkan dalam komunikasi merespon atau menanggapi sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi komunikasi.
 - c. Channel atau Media
Media adalah salah satu sarana atau media informasi yang telah diberikan sebagai akibat dari pemberian informasi atau terjadinya interaksi.
 - d. Goal atau Tujuan
Goal atau tujuan adalah kriteria komunikasi yang dapat ditunjukkan dengan partisipan memberi perhatian pada suatu isu, permasalahan, dan kepentingan tertentu kepada orang lain.
 - e. Relationship Type
Relationship type atau Tipe hubungan komunikasi umumnya bersifat interpersonal. Komunikasi yang berjalan sesuai etika yang baik, maka akan terjalin tipe hubungan komunikasi secara profesional.
2. Koordinasi
 - a. Hubungan Langsung
Koordinasi dapat terjadi melalui hubungan atau persamaan tujuan serta pandangan yang sama.
 - b. Kesempatan Awal
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah apabila tahap awal dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan adalah hal utama yang harus dilakukan dalam menjalankan koordinasi, dimana tujuan perencanaan adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan.
 - c. Kontinuitas
Koordinasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Kontinuitas adalah bentuk pengulangan secara terus menerus dimana proses perencanaan sampai pelaksanaan koordinasi

- dilakukan secara berulang
- d. Dinamis
Dinamis berarti koordinasi yang dilakukan harus terus berjalan.
Contoh dinamis yang dilakukan pada sinergitas antara Satpol PP dengan Dinas Sosial adalah dengan Penyelarasan Program dan Anggaran.
 - e. Tujuan yang jelas
Tujuan merupakan suatu yang penting dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam hal ini tujuan sinergitas dari Satpol PP adalah Dinas Sosial adalah penanganan gelandangan dan pengemis.
 - f. Organisasi yang sederhana, Struktur organisasi yang sederhana dapat memudahkan koordinasi yang efektif.
Struktur organisasi merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi. Berkaitan dengan hal ini sinergitas antara satpol pp dan dinas sosial adalah pembagian tugas yang jelas dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
 - g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
Dalam hal ini wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sebuah hirarki kepemimpinan yang ada. Masing-masing bidang dari kedua pihak terkait baik itu satpol pp dan dinas sosial.
 - h. Komunikasi yang efektif
Komunikasi adalah suatu cara yang paling efektif dan sangat berperan penting dalam melakukan suatu koordinasi. Jika komunikasi berjalan dengan baik antara satpol pp dan dinas sosial, maka akan terjalin pula suatu Kerjasama yang efektif dan efisien dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
 - i. Kepemimpinan dan supervise yang efektif
Kepemimpinan yang supervise, dalam hal ini yang dimaksud adalah keberhasilan suatu misi yakni penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandarlampung sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan suatu atasan tersebut.

3.2. Faktor Penghambat Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandarlampung

Faktor penghambat adalah faktor-faktor atau hal yang mempengaruhi sinergitas dan menyebabkan tidak lancar jalannya sinergitas antara Satpol PP dengan Dinas Sosial Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat sinergitas sebagai berikut:

1. Kurangnya Komunikasi dan Informasi
Ketidakjelasan atau kekurangan komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dapat menghambat sinergitas. Kurangnya pertukaran informasi tentang kasus-kasus, kebijakan, atau strategi penanganan dapat menyebabkan tumpang tindih dalam tindakan atau ketidaksesuaian dalam pendekatan.
2. Perbedaan Pendekatan dan Prioritas
Satpol PP dan Dinas Sosial mungkin memiliki pendekatan atau prioritas yang berbeda dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Perbedaan ini dapat menghambat sinergi

karena sulit untuk mencapai konsensus atau kesepakatan tentang langkah- langkah yang akan diambil.

3. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel, anggaran, atau fasilitas, dapat menjadi penghambat sinergitas. Tanpa sumber daya yang memadai, Satpol PP dan Dinas Sosial mungkin kesulitan untuk melaksanakan program atau tindakan penanganan dengan efektif.

4. Konflik Peran dan Kewenangan

Terdapat potensi konflik peran dan kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Sosial, terutama jika tidak ada pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

5. Ketidakstabilan Kebijakan

Perubahan kebijakan atau kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah atau otoritas terkait dapat mengganggu sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Ketidakpastian dalam panduan atau arahan dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.

6. Resistensi Internal

Adanya resistensi atau ketidaksetujuan internal di antara petugas Satpol PP atau Dinas Sosial terhadap upaya sinergi juga dapat menjadi penghambat. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor- faktor seperti perbedaan budaya organisasi atau kepentingan pribadi.

Mengatasi faktor-faktor penghambat ini memerlukan komitmen bersama, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang kuat antara SatpolPP dan Dinas Sosial, serta dukungan dari pihak-pihak terkait lainnya.

3.3. Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Di Kota Bandar Lampung

Upaya adalah hal yg dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam sinergitas dan menyebabkan tidak lancar jalannya sinergitas antara Satpol PP dengan Dinas Sosial . Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang menghambat sinergitas. Berdasarkan faktor penghambat dalam Sinergitas penanganan gelandangan dan pengemis dapat ditentukan beberapa Upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Berikut Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat:

1. Meningkatkan Komunikasi

Memperkuat komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial melalui pertemuan rutin, grup obrolan, atau sistem manajemen informasi yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan menyamakan pemahaman tentang masalah dan strategi penanganannya.

2. Memperjelas Peran dan Tanggung Jawab

Mengadakan diskusi dan pelatihan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik peran dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

3. Pembentukan Tim Gabungan

Membentuk tim gabungan antara Satpol PP dan Dinas Sosial yang bertugas untuk

merencanakan dan melaksanakan tindakan penanganan secara bersama-sama. Tim ini dapat bekerja secara lintas-sektor untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan mempromosikan sinergi antara kedua dinas.

4. Pengalokasian Sumber Daya yang Tepat

Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis, termasuk personel, anggaran, dan fasilitas. Hal ini dapat membantu mengatasi kendala-kendala praktis dalam pelaksanaan program.

5. Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Organisasi

Mendorong kepemimpinan yang kuat dan mendukung dari pihak pimpinan Satpol PP dan Dinas Sosial untuk mempromosikan kolaborasi dan sinergi. Selain itu, membangun budaya organisasi yang inklusif dan proaktif dalam memperkuat kerja sama antarunit atau antardepartemen.

6. Konsultasi dengan Pihak Eksternal

Melibatkan pihak eksternal seperti LSM, akademisi, atau praktisi terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan dukungan tambahan dalam upaya penanganan.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengatasi faktor penghambat dan memperkuat sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sinergitas Satpol PP dengan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandarlampung berjalan dengan baik dilihat dari telah berjalannya beberapa indikator sinergitas dengan baik. Peneliti menemukan temuan penting dimana meskipun sinergitas berjalan dengan baik namun jumlah gelandangan dan pengemis masih tetap tinggi dan terus meningkat sepanjang tahun 2020 – 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan yang menyebabkan jumlah gelandangan dan pengemis masih tinggi meskipun telah terjalin sinergitas yang baik. Selain itu, peneliti menemukan bahwa persebaran gelandangan dan pengemis di Kota Bandarlampung yang menyebabkan rusaknya tatanan dan estetika kota yang dalam praktiknya terus mengalami penurunan meskipun jumlahnya masih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh Sinergitas yang dijalankan oleh Satpol PP dengan Dinas Sosial dalam menangani persebaran gelandangan dan pengemis di beberapa titik krusial Kota Bandarlampung. Hal ini menunjukkan bahwa Sinergitas berperan penting dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Sama halnya dengan penelitian lainnya, penelitian ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki yang dalam hal ini adalah aparaturnya dan pemerintah daerah, layaknya dalam penelitian yang dilakukan (Roza Erdillah, 2015) yang mengatakan bahwa sumber daya memiliki peranan penting dalam Sinergitas.

IV. KESIMPULAN

Sinergitas Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandarlampung sudah cukup baik terlaksana sejauh ini. Hal itu dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari sistem penanganannya itu sendiri baik itu pada sistem penertiban dari satpol pp maupun dari

penanganan dinas sosial itu sendiri.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa waktu penelitian dalam pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penulisan yang dilakukan, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lain yang berkaitan dengan Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandarlampung Provinsi Lampung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Seksi Pengendalian Dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandarlampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswel, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. In *Research Design Qualitative Quantitative And Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles dan Huberman (1992). *reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi*.

Fernandes, S. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Erdillah, R., & Andry, H. (2015). *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*.

Najiyati & Rahmat (2011). *Sinergitas pemerintah dalam pembangunan kota terpadu mandiri*. Dalam *Jurnal ketransmigrasian* Vol. 28 No. 2011. 133-124.(Jakarta,Pusat Litbang Ketransmigrasian)

Wiratno, M. H. (2022). *Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh SatuanPolisi Pamong Praja di Kota Metro Provinsi Lampung*.

Penelitian Ida Bagus Eka Artika,dkk (2020) *Upaya Menurunkan Tingkat Kemiskinan Melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat*

Masrun (2020) *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Kewirausahaan UKM Bidang Pariwisata Di Kawasan Pesisir Pantai Cemara Lembar Kabupaten Lombok Barat*

Muhammad Munawir (2022) dan skripsi tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2021). *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2021*. Diakses dari <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/89c1b3d0038567aff884ca04/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2021.html>

